

Hubungan Ketahanan Nasional Dengan Politik Luar Negeri Republik Indonesia (2004 – 2008)

Wijayatri
98510375

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebijakan pertahanan keamanan dengan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2008. Khususnya pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masalah pertahanan keamanan tersebut menumpuk dan menjadi sebuah persoalan penting yang memaksa menjadi sebuah kepentingan nasional. Dimana pemerintah Indonesia mengalami krisis kepercayaan politik yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri.

Langkah Indonesia dalam meningkatkan pertahanan keamanan nasional dalam bidang politik dan sosial semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu langkah Pemerintah Indonesia dalam Reformasi Pertahanan Keamanan yaitu berupa (1) pembentukan Rangkaian Kebijakan Pertahanan Negara Sesuai Dengan Mandate Pasal 16 UU 3/2002, (2) Menyusun ulang anggaran pertahanan Indonesia (3) Penggunaan Langkah Pemberdayaan Masyarakat Sipil Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pertahanan dan Keamanan yaitu diantaranya diwujudkan melalui melibatkan peningkatan kemampuan, serta dalam bentuk pengawasan yang dilakukan (4) Penggunaan Langkah Diplomasi dalam pelaksanaan Pertahanan Keamanan. Dalam hal ini adalah memunculkan upaya untuk mengoptimalkan diplomasi sebagai garis depan pertahanan Politik Luar Negeri Republik Indonesia untuk menghilangkan intensi dan situasi yang akan memicu konflik.

Di akhir periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dilihat berbagai upaya tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Diantaranya pemenuhan terhadap tujuan politik luar negeri sesuai dengan tujuan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dalam hal ini akan diuraikan melalui langkah-langkah yang paling menonjol dilakukan oleh Indonesia, yaitu: *Pertama*, efektifitas dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara dan organisasi internasional di kawasan Amerika dan Eropa; *Kedua*, pemenuhan dalam upaya mewujudkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN; *Ketiga*, efektifitas dalam pemenuhan upaya memperkuat citra Indonesia. *Keempat*, mengoptimalkan diplomasi melalui pengelolaan hukum dan perjanjian internasional.

Kata Kunci: Ketahanan Nasional. Politik Luar Negeri